

# EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2024

INSPEKTORAT MAHKAMAH KONSTITUSI

2024

# Landasan Evaluasi ZI

PermenPANRb Nomor 90 Tahun 2021

- tentang pembangunan dan evaluasi ZI, menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah

SE MenpanRb Nomor 4 Tahun 2023

- tentang pengusulan dan evaluasi ZI Tahun 2023

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor ..... Tahun 2024

- Penetapan unit kerja WBK dan WBBM dalam rangka pembangunan ZI Mahkamah Konstitusi Tahun 2024

# PERMENPAN Nomor 90 TAHUN 2021



## HIGHLIGHT PERUBAHAN PENGUSULAN ZI

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	Nilai AKIP minimal "B"	
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	LHKASN dan LHKPN 100%	



## PERMENPAN 90 TAHUN 2021

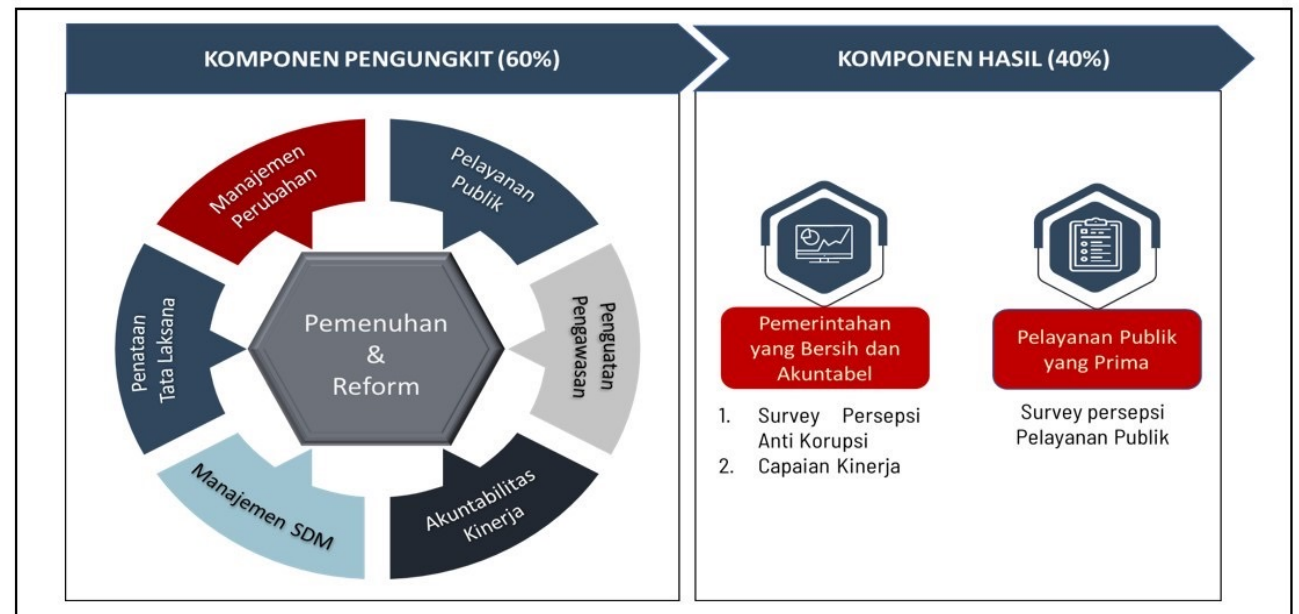
5

	WBK	WBBM	
Syarat Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian	
	Predikat SAKIP	Min. B	Min. BB
	Indeks RB	<input type="checkbox"/> Min CC untuk Pemda <input type="checkbox"/> Min B untuk K/L	<input type="checkbox"/> Min. B untuk Pemda <input type="checkbox"/> Min. BB untuk K/L
	Maturitas SPIP	Min. Level 3	
Syarat Tingkat unit kerja/satuan kerja	Karakteristik	<input type="checkbox"/> Merupakan core layanan utama dari instansinya <input type="checkbox"/> Memberikan dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat ttg kualitas birokrasi	
	Kepatuhan	<input type="checkbox"/> Penyelesaian TLHP dari APIP/BPK telah 100% <input type="checkbox"/> LHKASN dan LHKPN telah 100%	
	Periode Pembangunan	Telah melakukan pembangunan WBK Min. 1 Tahun	Telah melakukan pembangunan WBBM Min. 1 Tahun
	Predikat SAKIP Internal	Min. B	Min. BB

## 01 MEKANISME PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM



## 02 KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM



# MANAJEMEN PERUBAHAN

8



## TUJUAN

Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN

## MANAJEMEN PERUBAHAN



## KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
- Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap perubahan.
- Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak

PEMENUHAN	REFORM
Tim Kerja ZI	Komitmen Dalam Perubahan
Rencana Pembangunan ZI	Komitmen Pimpinan
Pemantauan dan Evaluasi ZI	Membangun Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	

# PENATAAN TATA LAKSANA



## TUJUAN

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur



## KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan;
- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan
- Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

PEMENUHAN	REFORM
SOP Kegiatan Utama	Pengaruh penyederhanaan birokrasi terhadap peta proses bisnis
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
Keterbukaan Informasi Publik.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat.

# PENATAAN MANAJEMEN SDM

## TUJUAN

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur

## PENATAAN MANAJEMEN SDM

10



## KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
- Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
- Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
- Meningkatnya profesionalisme SDM.

PEMENUHAN	REFORM
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Kinerja Individu
Pola Mutasi Internal	Assesment Pegawai
Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	Pelanggaran Disiplin Pegawai
Penetapan Kinerja Individu	

# PENGUATAN AKUNTABILITAS

11



## TUJUAN

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



## KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
- Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

PEMENUHAN	REFORM
Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya Capaian Kinerja
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pemberian Reward & Punishment atas dasar kinerja
	Kerangka Logis (penjabaran kinerja)



# PENGUATAN PENGAWASAN

12



## TUJUAN

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

## PENGUATAN PENGAWASAN



## KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
- Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
- Meningkatkan sistem integritas.

PEMENUHAN	REFORM
Gratifikasi ;	Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama ;
Penerapan SPIP ;	Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pengaduan Masyarakat ;	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
Whistle Blowing System ;	
Penangan Benturan Kepentingan	

# PELAYANAN PUBLIK

13



## TUJUAN

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik

## PELAYANAN PUBLIK



## KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
- Standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional
- Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

PEMENUHAN	REFORM
Standar pelayanan	Upaya dan/inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik;
Budaya pelayanan Prima;	Upaya dan/atau inovasi pada perizinan/pelayanan telah dipermudah
Pengelolaan Pengaduan;	Penanganan pengaduan pelayanan
Penilaian Kepuasan Terhadap pelayanan ;	
Peningkatan TI	

# Mekanisme Pengusulan ZI

## ► Dokumen yang harus dipenuhi untuk dikirim kepada MENPAN

1. Surat pimpinan instansi pemerintah tentang usulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
2. SK Pimpinan Instansi tentang Penunjukan Pembangunan ZI Menuju WBK;
3. LKE TPI (Laporan Inspektorat atas Hasil Evaluasi Unit Kerja, berdasarkan data evidence di microsite);
4. LHE AKIP internal (Hasil Evaluasi atas SAKIP Tahun 2023 pada Eselon II);
5. Bukti Penghargaan SPIP level 3 dari BPKP = PIC Inspektorat;
6. Rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN = PIC Inspektorat;
7. Surat Pernyataan (clearance) APiP yang menyatakan bahwa unit/satuan kerja yang diusulkan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan (100% TLHP) = PIC Inspektorat

# Mekanisme Pengusulan ZI

## ► Dokumen yang harus dipenuhi untuk dikirim kepada MENPAN

8. Ikhtisar pembangunan ZI unit/satuan kerja yang memuat informasi tentang upaya yang telah dilakukan = PIC SDMO (dibuat oleh unit kerja);
  - Maksimal 3 (tiga) halaman untuk setiap unit/satuan kerja; dan
  - Font 11, times new roman, spasi 1.15
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) = PIC oleh SDMO (dibuat oleh Unit Kerja);
10. Laporan hasil pelaksanaan survei mandiri sesuai format yang terdapat pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 (Survei SPKP dan Survei SPAK), dilaksanakan oleh unit kerja;
11. Matriks atau tabel pemetaan risiko unit/satuan kerja

# CATATAN HASIL EVALUASI ZI MK TAHUN 2023

- ▶ Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2023 pada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  1. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, sehingga mampu mewujudkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit kerja dan organisasi;
  2. Mengoptimalkan sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya fraud (KKN);
  3. Membangun kedekatan dengan pengguna layanan dengan menyampaikan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas organisasi, serta meningkatkan kerja sama dengan stakeholders untuk pencapaian kinerja yang lebih baik;
  4. Mendorong unit kerja terus berinovasi yang berfokus pada layanan utama yang terkait langsung dengan pengguna layanan

# CATATAN HASIL EVALUASI ZI MK 2023 (unit kerja)

No	Nama Unit/ Satuan Kerja	Catatan Menpan 2023
1.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) WBBM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2023 belum sepenuhnya tergambar karena sebagian besar bukti dukung belum diperbarui.</li><li>2. Penjenjangan kinerja belum terlihat keterkaitan antara kinerja ultimate outcome hingga level operasional.</li><li>3. Identifikasi risiko sudah dilakukan, namun belum mencakup risiko terkait integritas.</li><li>4. Identifikasi benturan kepentingan sudah dipetakan, namun penerapan dari identifikasi benturan kepentingan belum sepenuhnya dilakukan dan belum berdampak.</li><li>5. Bukti dukung rekapitulasi LHKAN bukan periode terakhir, (Tahun 2021).</li><li>6. Perjanjian Kinerja tahun 2023 belum dilampirkan.</li><li>7. Laporan Kinerja terbaru belum dilampirkan, sehingga informasi capaian kinerja tidak tergambar.</li><li>8. Bukti dukung pelaksanaan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas belum secara intensif dilakukan.</li></ol>

# CATATAN HASIL EVALUASI ZI MK 2023 (unit kerja)

No	Nama Unit/ Satuan Kerja	Catatan Menpan 2023
2.	Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Pustik) WBBM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2023 belum sepenuhnya tergambar karena sebagian besar bukti dukung belum diperbarui.</li><li>2. Penjenjangan kinerja belum terlihat keterkaitan antara kinerja ultimate outcome hingga level operasional.</li><li>3. Identifikasi risiko sudah dilakukan, namun belum mencakup risiko terkait integritas.</li><li>4. Bukti dukung terkait pengelolaan tindak lanjut pengaduan belum ada.</li><li>5. Identifikasi benturan kepentingan sudah dipetakan, namun penerapan dari identifikasi benturan kepentingan belum sepenuhnya dilakukan dan belum berdampak.</li><li>6. Bukti dukung rekapitulasi LHKAN individu belum disampaikan (SPT).</li><li>7. Perjanjian Kinerja tahun 2023 belum dilampirkan.</li><li>8. Laporan Kinerja terbaru belum dilampirkan, sehingga informasi capaian kinerja tidak tergambar.</li></ol>

# CATATAN HASIL EVALUASI ZI MK 2023 (unit kerja)

No	Nama Unit/ Satuan Kerja	Catatan Menpan 2023
3.	Biro Humas dan Protokol WBK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagian besar bukti dukung belum diperbarui;</li><li>2. Identifikasi risiko sudah dilakukan, namun belum mencakup Risiko terkait Integritas;</li><li>3. Identifikasi Benturan Kepentingan sudah dilakukan, namun penerapan dari Identifikasi Benturan Kepentingan belum sepenuhnya dilakukan dan belum berdampak.</li><li>4. Bukti dukung rekapitulasi LHKAN Individu belum disampaikan.</li><li>5. Perjanjian Kinerja tahun 2023 belum dilampirkan.</li><li>6. Laporan Kinerja terbaru belum dilampirkan, sehingga informasi capaian kinerja tidak tergambar.</li><li>7. Bukti dukung pelaksanaan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas belum secara intensif dilakukan</li></ol>



# JADWAL PELAKSANAAN EVALUASI ZI MK 2024

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pengisian LKE dan pengupdate-an data dukung pada microsite	Paling lambat 9 Juli 2024	
2.	Pelaksanaan Survei Mandiri unit kerja	10 Juli – 12 Juli 2024	Proses Evaluasi Micosite unit kerja oleh Inspektorat
3.	Pengajuan unit kerja calon WBK dan WBBM	14 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi dokumen dukung untuk ke Menpan</li><li>- Mengirim Laporan Hasil Evaluasi ZI oleh TPI ke aplikasi Menpan</li></ul>

Terima Kasih

INSPEKTORAT 2024